

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa pasar CPO Indonesia dan Malaysia terbukti terintegrasi secara signifikan dalam kategori *imperfect market integration*. Pengujian empiris mengonfirmasi hubungan satu arah (*unidirectional*) di mana harga CPO domestik Indonesia dipengaruhi secara dominan oleh bursa Malaysia (MDEX) tanpa adanya kausalitas balik. Asimetri ini menjadi paradoks struktural mengingat Indonesia menguasai 58% pangsa pasar produksi CPO global (USDA FAS, 2025). Faktor utama penyebab posisi Indonesia sebagai *price taker* ini adalah perbedaan kematangan institusional bursa, di mana MDEX memiliki tingkat likuiditas transaksi dan transparansi pembentukan harga (*price discovery*) yang jauh lebih tinggi sebagai acuan global. Adapun kecepatan penyesuaian harga domestik menuju keseimbangan jangka panjang berlangsung secara gradual dan membutuhkan waktu sekitar 8 hingga 9 hari perdagangan setelah terjadi guncangan pasar.

Terkait dengan intervensi pemerintah, kebijakan fiskal ekspor terbukti memiliki efektivitas yang asimetris dalam memitigasi transmisi harga global. Bea Keluar (BK) efektif memengaruhi harga domestik secara instan melalui jalur transmisi langsung pada kalkulasi *netback price* harian, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Sebaliknya, Pungutan Ekspor (*Levy*) tidak efektif memengaruhi harga pada rentang harian jangka pendek, melainkan memiliki pengaruh yang bersifat *delayed* (tertunda) dan kumulatif dalam jangka menengah.

Perbedaan efektivitas ini mencerminkan divergensi arsitektur transmisi kedua instrumen, di mana BK berdampak langsung melalui mekanisme harga, sementara *Levy* bekerja secara tidak langsung via jalur program pendanaan BPDPKS dengan jeda waktu penyesuaian yang lebih panjang.

Lebih lanjut, analisis dekomposisi volatilitas membuktikan bahwa guncangan eksternal dari pasar Malaysia jauh lebih dominan dan persisten dalam menjelaskan varians harga CPO domestik dibandingkan intervensi kebijakan fiskal domestik. Karakteristik transmisi ini bekerja secara bertahap seiring berjalannya waktu: pada jangka pendek (periode ke-10), kontribusi harga Malaysia telah mencapai 24,66% sementara kebijakan fiskal hanya memberikan efek sebesar 2,02%, yang mencerminkan rasio dominasi sekitar 12:1. Dominasi bursa eksternal ini terus menguat secara gradual hingga jangka panjang (periode ke-30), di mana kontribusi harga Malaysia melonjak drastis hingga mencapai 48,87% atau hampir memenuhi separuh dari total volatilitas harga domestik, sedangkan akumulasi efek kebijakan fiskal tertahan di level 10,75%. Pola pergerakan persisten ini menegaskan bahwa selama peran *price discovery* bursa domestik (ICDX) belum diperkuat, ketergantungan struktural harga domestik terhadap bursa luar negeri akan terus berlanjut

5.2 Saran

Berpijak pada kesimpulan di atas, penelitian ini mengajukan beberapa rekomendasi strategis sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah (Kementerian Keuangan dan BPDPKS): Koordinasi penetapan tarif BK dan *Levy* perlu diperhatikan secara ketat agar akumulasi *policy wedge* tidak menimbulkan distorsi harga domestik yang berlebihan.

Pemerintah direkomendasikan untuk menerapkan target koridor maksimum tarif efektif di kisaran 10% hingga 15% $(BK + Levy) \times 0,15$ Harga Malaysia. Batasan koridor ini mengacu pada batasan empiris WTO (2004) bahwa tarif aman komoditas negara berkembang berada di bawah 10%, serta kajian World Bank (Malouche, 2012) yang mengklasifikasikan ganjalan tarif di atas 15% sebagai *high-distortion mechanism*. Koridor ini krusial untuk mengevaluasi guncangan ekstrem seperti yang ditemukan pada hasil kalkulasi data Lampiran 3 penelitian ini, di mana rasio akumulasi beban tarif efektif efektif bulanan Indonesia sempat menyentuh titik puncak tertinggi (*peak structural shock*) sebesar 22% pada Agustus 2022 akibat rigiditas tarif nominal domestik di tengah koreksi harga CPO global. Batasan threshold otomatis ini penting guna mencegah terjadinya mekanisme *backward shifting* yang menekan harga beli TBS di tingkat petani hulu.

2. Bagi Pengembangan Pasar: Penguatan peran ICDX sebagai bursa referensi perlu terus ditingkatkan untuk membangun kedaulatan bursa nasional (*institutional sovereignty*). Langkah ini mendesak guna mengimbangi fakta struktural hulu berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kompas, 2022), di mana sekitar 30%–40% (setara 3 juta hektar) lahan sawit di Indonesia dikuasai investor Malaysia yang secara korporasi berkiblat pada bursa luar negeri (BMD). Penguatan likuiditas dan transparansi di ICDX menjadi prasyarat mutlak agar Indonesia dapat bergeser dari *price taker* menuju *price maker* sehingga harga TBS petani lokal tetap terlindungi dari guncangan pasar internasional.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan nonlinear seperti Threshold Vector Error Correction Model (TVECM) atau Markov Regime Switching untuk menguji kemungkinan adanya asimetri transmisi harga pada periode perubahan kebijakan ekstrem. Selain itu, penggunaan data bulanan atau kuartalan dapat dipertimbangkan untuk menangkap dampak jangka menengah kebijakan fiskal, khususnya *Levy*, yang tidak selalu tercermin secara langsung dalam volatilitas harga harian.